

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu entitas pada jangka waktu tertentu (Harahap, 2009). Menurut SAK, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, meliputi; neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (arus kas, atau arus dana, catatan, dan laporan lain) serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral darinya (IAI, 2009).

Dapat dikatakan bahwa laporan keuangan mencerminkan semua transaksi usaha sepanjang waktu yang menghasilkan baik peningkatan maupun penurunan bersih nilai ekonomi bagi pemilik modal. Oleh karena itu laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu entitas.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2009). Sedangkan menurut Fahmi, tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap entitas di samping pihak manajemen entitas (Fahmi 2011).

Laporan keuangan juga dapat menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap kualitas laporan keuangan tersebut. Kualitas laporan keuangan sebuah entitas tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan entitas bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana entitas menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan

prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi. Baik buruknya kualitas keuangan dapat dilihat dari sehat atau tidak sehatnya entitas tersebut. Entitas yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas baik tanpa adanya penyimpangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas entitas (Apriansyah, dkk, 2020).

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan dapat memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Ihsanti, 2014).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan yang berguna dan berkualitas bagi pemakai informasi bahwa harus terdapat empat indikator kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan (IAI, 2009). Selain dari keempat aspek tersebut kualitas laporan keuangan suatu entitas juga dapat dinilai dari hasil penilaian akuntan publik, apakah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (Unqualified Opinion with Explanatory Language), Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion), tidak Wajar (Adverse Opinion), atau bahkan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion or No Opinion) (Mahmudi, 2007).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural

yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS di Indonesia terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kota/Kabupaten. BAZNAS Pusat berlokasi di Wisma SIRCA, Jl. Johar No.18, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Adapun BAZNAS Provinsi sebanyak 34 kantor BAZNAS, dan BAZNAS Kota/Kabupaten sebanyak 272 kantor BAZNAS di seluruh provinsi di Indonesia.

Berkaitan dengan BAZNAS, instansi tersebut menunjukkan konsistensinya sebagai pengelola dana umat yang bersih. Buktinya laporan keuangan lembaga itu ketika diaudit setiap tahun selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari lembaga akuntan publik. Pada laporan keuangan 2021 BAZNAS diaudit kantor akuntan publik Ahmad Raharjo (AR) Utomo (baznas.go.id, 2022).

Selain BAZNAS Pusat, adapun laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Maros tahun 2021 dan 2022 meraih predikat opini WTP dari kantor akuntan publik. Ketua BAZNAS Kabupaten Maros, Said Patombongi, mengatakan, predikat ini adalah wujud komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan capaian ini diharapkan masyarakat akan makin mempercayakan zakat, infak dan sedekahnya melalui Baznas. Sehingga akan makin banyak mustahik yang menerima manfaatnya (BAZNAS Maros).

Untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik, agar bebas dari kesalahan dan dapat diandalkan maka dibutuhkan sistem pendukung. Sistem Informasi Manajemen dibutuhkan agar pembuatan laporan keuangan yang dibuat bisa lebih mudah untuk menghasilkan informasi yang benar dan jauh dari berbagai macam kesalahan. BAZNAS sendiri membangun sebuah sistem yang dikembangkan untuk keperluan

penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional, sistem itu diberi nama SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen BAZNAS. SIMBA telah diaplikasikan semenjak tahun 2012 pada 31 BAZNAS Provinsi (Simba.baznas.go.id). Selain, sistem informasi manajemen juga dibutuhkan sebuah prosedur operasional yang mengatur tentang pembuatan laporan keuangan, prosedur itu dapat diperoleh melalui penggunaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Peningkatan kinerja dari BAZNAS dalam pengelolaan laporan keuangan dapat dioptimalkan dari penggunaan sistem manajemen informasi yang telah dikembangkan oleh BAZNAS pusat yaitu penggunaan sistem informasi manajemen (SIMBA). Pemerintah berinisiatif menciptakan SIMBA yang sudah diadaptasi menggunakan PSAK 109, dan hal itu bekerja sama dengan BAZNAS dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah dikelola oleh PSAK 109 terdiri dari lima macam, juga yang terdapat pada SIMBA bahwa sistem tersebut bisa membentuk lima laporan keuangan dan laporan keuangan pada lembaga zakat harus patuh terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. (Wijayanti, dkk., 2020)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan

memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah (Yulianti, 2021).

Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 jika dilihat secara teoritis dapat mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun demikian, seberapa besar pengaruh dari penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap kualitas laporan keuangan ini masih perlu ditinjau lebih jauh lagi untuk memahami kontribusi yang dihasilkan dari setiap sudut dan sisinya.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Fauziyah Latiefa Salsabila (2022) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan PSAK No. 109 terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang, dengan hasil Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang. Hal ini bisa terjadi karena implementasi dari SIMBA itu sendiri yang masih relatif muda untuk digunakan, secara nasional program SIMBA sudah digunakan dibawah kurun waktu 10 tahun. Namun penelitian tersebut bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, dkk (2020) yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas sebuah laporan keuangan.

Secara umum sebuah sistem informasi manajemen harusnya memperkuat kualitas laporan keuangan. Sistem informasi manajemen merupakan suatu hal yang cukup penting untuk menunjang sistem operasional perusahaan dan organisasi. Sistem informasi yang merupakan jaringan dan perangkat komputer yang saling berkaitan dan terintegritas guna menghasilkan suatu informasi atau data untuk membuat keputusan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan jika penerapan sistem informasi manajemen pada perusahaan ini sudah dilakukan dengan sangat baik dan membantu kegiatan operasional menjadi lebih terstruktur dan baik (Annisa, 2022).

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, serta masih adanya gap antara teori dengan fakta di lapangan, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana “Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari implementasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) terhadap kualitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Maros Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana pengaruh dari Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 terhadap kualitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Maros Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana pengaruh dari implementasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Maros Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang dapat disusun dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari implementasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) terhadap kualitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 terhadap kualitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari implementasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis ditinjau secara teoritis usulan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
 - a. Membawa ide, keahlian, dan wawasan keilmuan untuk kemajuan akuntansi dan akuntansi syariah pada umumnya, dan akuntansi zakat pada khususnya.
 - b. Dapat menjadi salah satu kontribusi data empiris dalam topik sistem informasi akuntansi, laporan standar akuntansi keuangan 109 tentang zakat, infak, dan sedekah, serta keakuratan laporan keuangan suatu instansi.
2. Manfaat praktis selanjutnya dilihat secara praktis skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
 - a. Dapat memberikan penghargaan kepada peneliti dengan gelar strata I (S.Akun) dan dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi lebih lanjut bagi penulis/peneliti secara individu serta membantu dalam membandingkan teori yang dipelajari di perkuliahan dengan pengalaman lapangan yang sebenarnya.

- b. Diharapkan sebagai bahan pemikiran dan masukan penilaian bagi Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk bertindak sebagai pedoman dan review dalam menghadapi suatu permasalahan internal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

